

## **BAB II**

### **ISU PERDAGANGAN MANUSIA DI ASIA SELATAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang perdagangan manusia di lingkup Internasional, kawasan Asia Selatan, di India dan di Bangladesh. Dalam sub bab pertama, penulis membahas perdagangan manusia secara umum di lingkup Internasional dan kawasan Asia Selatan, bagaimana perdagangan manusia dapat terjadi, persentasi jumlah korban, hingga wilayah-wilayah dengan transaksi perdagangan manusia terbanyak. Pada sub bab kedua dan ketiga penulis membahas sedikit tentang masing-masing profil negara India dan Bangladesh. Kemudian penulis membahas secara rinci mengenai perdagangan manusia di masing-masing negara.

#### **A. Perdagangan Manusia di Asia Selatan**

Perdagangan manusia terjadi semenjak adanya pembagian kelas-kelas dalam masyarakat. Perdagangan manusia kemudian menjadi masalah yang mulai mendapat perhatian dunia setelah pada tahun 1904 diadakan sebuah Konvensi Internasional untuk Penekanan terhadap Perdagangan Budak Berkulit Putih (*International Convention for the Suppression of the "White Slave Traffic"*). Meskipun konvensi ini hanya mengacu pada perempuan-perempuan Eropa yang bekerja diluar negeri yang kemudian mengalami penipuan dan pemaksaan kerja, namun konvensi ini merupakan langkah awal dunia internasional melawan adanya perdagangan manusia.

Setelah Perang Dunia pertama berakhir dan terbentuk Liga Bangsa-Bangsa, diadakan sebuah konvensi lanjutan dengan mengubah rujukan perbudakan kulit putih menjadi perdagangan perempuan dan anak. Hal ini dilakukan dengan melihat kenyataan bahwa

sebagian besar korban atas perdagangan manusia adalah perempuan dan anak-anak.

Perdagangan manusia sendiri didefinisikan sebagai kegiatan pencarian, penjualan, pembelian, penampungan, penerimaan, pendistribusian manusia dengan menggunakan kekerasan berupa ancaman, penculikan, penipuan, penyalahgunaan jabatan atau memanfaatkan ketidaktahuan atau penerimaan bayaran atau imbalan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki wewenang atas korban dengan tujuan eksploitasi terhadap korban (UNODC, Topics: Human Trafficking, 2014).

Perdagangan manusia terjadi umumnya disebabkan oleh masalah ekonomi. Keadaan ekonomi yang buruk membuat banyak orang memilih untuk melakukan migrasi guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hal ini kemudian dilihat sebagai kesempatan bagi sebagian kelompok yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan para calon imigran. Dengan penipuan janji kehidupan yang lebih layak membuat kebanyakan orang tua rela melepaskan anaknya untuk bekerja di luar negeri. Sebagian besar calon imigran yang terjebak dalam perdagangan adalah perempuan dan anak dibawah umur yang berpendidikan rendah, tidak memiliki keahlian dasar atau pengetahuan tentang segala prosedur untuk bekerja di luar negeri. Calon imigran diseludupkan, ditampung dan didistribusikan secara ilegal, dipaksa untuk menjadi buruh dengan upah rendah dan jam kerja yang melebihi batas, bahkan menjadi pekerja seks komersial.

Selain itu, Budi Winarno dalam bukunya *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer* (2014) menyebutkan bahwa lemahnya peran dan kontrol pemerintah juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan manusia. Terdapat banyak badan kerja sama pencari tenaga kerja palsu atau yang tidak bertanggung jawab yang menawarkan jasa penyaluran tenaga kerja ke luar negeri sebagai pekerja rumah tangga, buruh, pekerja hotel, industri, dengan merujuk nama tempat yang tidak

diketahui korban (Winarno, 2014, hal. 341). Badan penyalur tenaga kerja seharusnya telah mengantongi izin resmi dari pemerintah terkait penyaluran tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri. Badan tenaga kerja ini juga harus melakukan perjanjian yang adil, tidak memaksakan jam kerja, tidak menahan upah pekerja, tidak menahan identitas pekerja dan tidak membbankan pekerja dengan biaya administrasi perekrutan yang mahal. Tenaga kerja yang tidak terdaftar oleh pemerintah akan sulit untuk dilacak keberadaan tempat kerjanya serta tidak mendapat perlindungan oleh negara yang seharusnya diperoleh tenaga kerja tersebut.

Pelaku perdagangan manusia biasanya memiliki latar belakang yang sama dengan korban. Kebanyakan pelaku adalah orang-orang dengan asal etnis atau wilayah tempat tinggal yang sama dan bahasa yang sama. Jenis kelamin juga berpengaruh dalam merekrut korban. Lebih dari 60 persen pelaku perdagangan adalah laki-laki. Di beberapa negara perempuan berperan besar menjadi pelaku perdagangan, misalnya pada kasus perdagangan perempuan dan gadis dibawah umur di wilayah Eropa Timur dan Asia Tengah yang kebanyakan mengalami penipuan janji pekerjaan oleh perempuan lain. Tidak jarang pelaku perdagangan manusia juga berasal dari kerabat dekat, tetangga atau saudara korban. Keluarga akan mudah memberikan izin anaknya untuk bekerja dengan mempercayakan pada orang yang mereka kenal. Hubungan kekerabatan dimanfaatkan untuk mencari keuntungan atas penipuan pekerjaan.

Untuk kasus perdagangan manusia lintas negara, meskipun tidak selalu, namun sering ditemukan bahwa korban adalah orang-orang yang berasal dari kelompok imigran gelap atau pengungsi. Kedua kelompok ini rentan untuk menjadi korban perdagangan manusia. Keadaan perang dan bencana alam membuat sebagian orang mengambil keputusan untuk bermigrasi. Misalnya pada kasus meningkatnya jumlah korban perdagangan manusia

yang berasal dari Suriah semenjak konflik negara tersebut berlangsung. Korban bencana alam dan perang yang tidak memiliki tujuan tempat tinggal sementara atau terpisah dari keluarga berpeluang besar untuk menjadi korban perdagangan manusia.

Perdagangan manusia saat ini lebih cenderung berada pada siklus di dalam negeri dan antar negara yang saling berbatasan atau dalam satu kawasan regional. Beberapa perdagangan manusia antar negara berhubungan dengan arus migrasi. Migrasi dengan populasi dan pergerakan yang kompleks cenderung memiliki rute dan transportasi yang sama dengan korban perdagangan manusia. Arus migrasi menjadi lahan perdagangan manusia juga diakibatkan oleh adanya kelompok kejahatan lintas negara terorganisir. Migrasi dengan skala yang besar sangat beresiko dan rentan bagi para pengungsi dan imigran untuk mendapatkan kekerasan, pelanggaran HAM, penipuan, penculikan hingga akhirnya diperdagangkan (UNODC, 2016, hal. 18).

Manusia diperdagangkan dengan berbagai tujuan, antara lain eksploitasi seksual, pernikahan secara paksa, kerja paksa, mengemis secara paksa, penjualan anak, tentara anak-anak, pernikahan anak dan penjualan organ. Interpol menggolongkan perdagangan manusia ke dalam 4 kategori sebagai berikut. Pertama, perdagangan pada perempuan untuk eksploitasi seksual. Kedua, perdagangan manusia untuk kerja paksa. Ketiga, eksploitasi seksual komersial pada anak-anak dalam industri pariwisata. Keempat, penjualan organ manusia (Interpol, 2014).

Data UNODC pada tahun 2014 menunjukkan lebih dari 85 persen perdagangan manusia di 71 negara di dunia bertujuan untuk eksploitasi kerja buruh paksa (UNODC, 2016, hal. 25). Dalam hal lain, kelompok bersenjata merekrut anak-anak korban perang, terutama laki-laki, untuk dijadikan tentara yang ikut berperang di wilayah seperti Afrika Sub-Sahara dan Timur Tengah. Sedangkan

penjualan organ terjadi sebagian besar di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah.

Menurut *US Department of Justice*, perdagangan manusia menjadi aktivitas kriminal ketiga yang paling menguntungkan di dunia, dengan keuntungan sekitar \$ 9,5 miliar pertahunnya, melebihi keuntungan yang didapat dari perdagangan narkoba maupun perdagangan senjata di dunia (Freedom First Federation, 2009).

Dalam sepuluh tahun terakhir, perdagangan manusia mengalami perubahan dimana jumlah laki-laki (baik dewasa maupun anak-anak) yang menjadi korban perdagangan manusia meningkat, meskipun perempuan masih menjadi korban dengan jumlah terbanyak. Departemen Luar Negeri AS memperkirakan lebih dari 800.000 orang dipedagangkan secara global tiap tahunnya. Di tahun 2014, tercatat jumlah persentase korban perdagangan manusia di 85 negara dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 51 persen, sedangkan laki-laki 21 persen dan anak-anak 28 persen, dengan anak perempuan sebesar 20 persen dan anak laki-laki sebesar 8 persen. Di wilayah seperti Afrika Sub-Sahara dan Amerika Tengah dan Kepulauan Karibia lebih dari 60 persen dari korban perdagangan manusia adalah anak-anak. (UNODC, 2016, hal. 6).

Di 47 negara, 74 persen korban diperdagangkan di dalam wilayah regional. Ini berarti hanya sedikit perdagangan manusia yang melalui rute yang panjang. Sedangkan perdagangan manusia terbanyak terjadi antar perbatasan negara dalam satu kawasan regional. Tercatat mayoritas korban dari Asia dan Afrika Timur diperdagangkan ke Timur Tengah. Afrika Sub-Sahara menyumbang sekitar 41 persen korban ke Timur Tengah. Sementara korban yang berasal dari Afrika Barat, Eropa dan Amerika Selatan umumnya diperdagangkan ke wilayah Eropa Barat dan Eropa Selatan. Korban dari Eropa Timur terdeteksi di 55 negara di dunia, terutama di bagian Eropa lainnya dan Timur Tengah. Sedangkan korban dai

Asia Selatan terdeteksi di 35 negara, terutama kawasan Asia Selatan itu sendiri, Eropa Barat dan Tengah dan Timur Tengah (UNODC, 2016, hal. 46-47).

Untuk mencegah, menekan dan menghukum tindakan perdagangan manusia khususnya terhadap perempuan dan anak, pada tahun 2000 Majelis Umum PBB telah mengeluarkan Protokol Perdagangan Manusia PBB. Protokol ini berisi 20 artikel, dimana ketentuan umum dimuat dalam artikel 1-5, perlindungan terhadap korban perdagangan manusia terdapat dalam artikel 6-8, pencegahan, kerjasama dan tindakan lainnya pada artikel 9-13, serta ketentuan akhir tertera pada artikel 14-20.

Protokol Perdagangan Manusia PBB ini mulai berlaku pada tahun 2003. Sekitar 34 persen negara di dunia mulai memperkenalkan protokol di tahun 2004 hingga 2008. Pada akhir tahun 2008 hingga 2012, terdapat 22 negara yang memperkenalkan protokol tersebut. Hingga tahun 2016, 11 persen dari 179 negara telah memperkenalkan protokol PBB ini di negaranya (UNODC, 2016, hal. 49-50).

Tidak lama setelah penandatanganan protokol PBB ini, beberapa negara di kawasan Eropa Tengah, Selatan, dan Timur dan Asia Tengah mulai mengadopsi undang-undang pelanggaran terhadap perdagangan manusia sesuai dengan definisi di dalam protokol. Pada tahun 2012 hingga 2016 Afrika Sub-Sahara telah membuat kemajuan mengenai undang-undang pelanggaran perdagangan manusia.

Pada Oktober 2016 telah diratifikasi oleh lebih dari 170 negara. Negara telah mengkriminalkan segala aspek yang termasuk ke dalam kategori perdagangan manusia sesuai dengan protokol PBB. Sayangnya, beberapa negara masih tidak memberlakukan undang-undang terkait masalah ini sesuai dengan definisi protokol. Masih banyak orang yang belum mendapatkan perlindungan yang sesuai.

Pada 76 negara, rata-rata terdapat 5 korban untuk tiap pelaku yang dihukum. Di Eropa Timur dan Asia

Tengah, setiap satu orang pelaku yang dihukum memiliki 4 korban yang diperdagangkan. Sedangkan satu orang pelaku di Afrika Sub-Sahara memiliki sekitar 14 korban. Pada periode 2012 hingga 2014 di 136 negara, hanya 10 hukuman per tahun yang dideteksi terkait perdagangan manusia. 15 persen dari 136 negara pada periode tersebut tidak mencatat hasil kejahatan perdagangan manusia. Hal ini menyebabkan sulitnya untuk melacak kembali pelanggaran tindakan perdagangan manusia.

Penghukuman terhadap tindakan perdagangan manusia suatu negara kurang lebih dipengaruhi oleh seberapa lama suatu negara telah mengkriminalkan masalah tersebut, termasuk proses pengenalan kepada seluruh komponen masyarakat agar masyarakat dapat mengerti dan sadar akan pelanggaran tindakan perdagangan manusia serta ikut berpartisipasi dalam mencegah, menekan dan menghukum tindakan perdagangan manusia, yang diikuti dengan realisasi di kehidupan masyarakat.

Asia Selatan terdiri dari 8 negara. Luas wilayah Asia Selatan sekitar 44,58 juta km<sup>2</sup> dengan populasi sekitar 1,766 miliar jiwa pada tahun 2016. Asia selatan secara geografi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu utara, daratan rendah Indo-Gangga, dan Semenanjung Deccan di selatan. Daerah Deccan dan Lembah Indo-Gangga terbagi menjadi empat wilayah. Sektor utara terdiri dari barat laut (Punjab, Himachal Pradesh dan Haryana), daratan Gangga Tengah, daratan Gangga Timur, Rajputana dan Kathiawar. Sektor selatan terdiri dari Ghat Barat, Ghat Timur, Dataran Tinggi Tengah dan Ujung Selatan (Rawlinson, 1954, hal. 6).

Mayoritas penduduk Asia Selatan beragama Hindu, dengan penyumbang terbanyak dari India. Kerajaan Hindu sendiri membawa budaya tradisional yang sangat khas di wilayah tersebut. Misalnya pada adat pernikahan dan kelas-kelas dalam masyarakat. Tarian juga menjadi salah satu

bagian dari tradisi Asia Selatan. Asia Selatan masih menjadi kawasan negara-negara berkembang di dalamnya.

Asia Selatan mengalami peningkatan ekonomi di tahun 2016 dengan dipimpin oleh India sebagai pusatnya. Saat ini Asia Selatan masih menjadi kawasan dengan sektor pertanian sebagai sumber perekonomian utama. Meskipun begitu, lapangan pekerjaan masih sangat terbatas di beberapa wilayah Asia Selatan, terutama diluar sektor pertanian. 70 persen penduduk Asia Selatan dengan usia produktif berada di pedesaan-pedesaan dan bekerja pada sektor pertanian. Pada umumnya pekerjaan lain yang dilakukan penduduk selain pertanian adalah pada sektor pelayanan jasa. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh *International Labour Organization* (ILO), kemiskinan di Asia Selatan meningkat dari 25 persen di tahun 2015 menjadi 49,4 persen di tahun 2016 (ILO, 2017).

Terjadi ketimpangan ekonomi sosial di lingkungan Asia Selatan yang berakibat pada perlakuan tidak adil. Adanya kelas-kelas dalam masyarakat, menjadikan kelompok yang lebih tinggi memperlakukan kelompok lain secara tidak baik. Sebagian perempuan melakukan pernikahan antar kelas masyarakat atas dengan masyarakat bawah guna menghilangkan kelas, namun beberapa justru dieksploitasi dan diperbudak bahkan oleh suaminya sendiri.

Permasalahan lain yang dialami oleh Asia Selatan adalah keamanan perbatasan antar negara. Agen-agen tenaga kerja melakukan pemalsuan data diri, dokumen perjalanan dan melakukan penyelundupan imigran. Banyaknya imigran ilegal yang lolos dari pengawasan penjagaan petugas perbatasan meenunjukkan lemahnya sistem keamanan yang berlaku di perbatasan antar negara di Asia Selatan. Tidak jarang petugas bekerja sama dengan agen yang telah membayar mereka dalam menyelundupkan imigran.

Selanjutnya budaya dimana perempuan masih dipandang rendah juga mempengaruhi terjadinya masalah-

masalah di Asia Selatan. Partisipasi perempuan dalam ranah pekerjaan umum masih sangat minim, terutama di negara Pakistan, India dan Bangladesh. Faktor yang mendasari hal ini adalah pemikiran yang ditanamkan dari dalam lingkungan keluarga, dimana perempuan seharusnya bekerja hanya untuk keluarga, mengurus urusan rumah tangga dan tidak bekerja pada sektor umum. Sehingga mayoritas perempuan di Asia Selatan tidak berpendidikan tinggi, beberapa bahkan menikah di bawah usia 18 tahun yang diatur oleh orang tua dengan maksud untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Akibatnya perempuan rentan untuk disiksa, dieksploitasi, sulit mendapat pekerjaan dengan pengetahuan dan skill yang tidak memadai dan memilih untuk melakukan migrasi yang rentan terhadap kejahatan.

Kawasan Asia Selatan menjadi salah satu kawasan dengan angka perdagangan manusia yang cukup tinggi. Dari 8 negara di Asia Selatan, 2 diantaranya masih berstatus *Tier 2 Watch List* yang diberikan oleh *Trafficking Victims Protection Act* (TVPA) Amerika Serikat pada tahun 2017, yaitu Bangladesh dan Pakistan. Keenam negara Asia Selatan lainnya telah menunjukkan perkembangan dengan naik ke status *Tier 2*. *Tier 2* sendiri adalah tingkatan dimana suatu negara memiliki angka perdagangan manusia yang tinggi, tidak memenuhi standar minimum TPVA, namun negara tersebut aktif dalam usaha pencapaian standar TPVA dan memiliki langkah-langkah untuk mengurangi masalah tersebut di negaranya. *Tier 2 Watch List* memiliki arti hampir serupa dengan *Tier 2*. Perbedaannya adalah negara-negara *Tier 2 Watch List* mengakui telah melakukan usaha untuk mencapai standar minimum TPVA, namun justru angka perdagangan manusia di negara tersebut terus bertambah secara signifikan.



Gambar 2.1. Persebaran Korban Perdagangan Manusia yang Terdeteksi Dari Asia Selatan di Tahun 2012-2014  
 Source: (UNODC, 2016)

Asia Selatan menyumbang 2 persen angka perdagangan manusia lintas negara dengan rute jarak menengah dan jauh. Dari tahun 2012 hingga 2014 korban yang berasal dari Asia Selatan sendiri ditemukan di 35 negara di dunia terutama kawasan Eropa Barat, Eropa Tengah dan Timur Tengah. Lebih dari 85 persen perdagangan manusia di Asia Selatan terjadi di dalam negeri akibat dari kesenjangan sosial-ekonomi dalam negeri yang tinggi, populasi yang besar dan arus migrasi yang kuat. 8 persen lainnya korban ditemukan di negara-negara tetangga di kawasan Asia Selatan, seperti dari Nepal dan Bangladesh menuju India. Sebagian besar sisanya diperdagangkan ke Timur Tengah dan Eropa, serta Amerika Selatan dan beberapa negara bagian Amerika Serikat.

Laporan dari organisasi non-pemerintah yang berada di Asia Selatan mengatakan anak-anak diperdagangkan dengan tujuan buruh paksa, sebagian anak perempuan dibawah umur mengalami pernikahan paksa. Sebanyak 85 persen korban di 4 negara, yaitu Nepal, India,

Bangladesh dan Sri Lanka, diperdagangkan sebagai buruh paksa.

Hingga tahun 2012, sebanyak 60 persen korban yang diperdagangkan adalah orang dewasa, baik perempuan maupun laki-laki, 40 persen korban lainnya adalah anak-anak dibawah umur 17 tahun. Di Nepal, sebagian besar korban yang terdeteksi adalah orang dewasa. Sedangkan di Bangladesh dan India korban yang paling banyak dilaporkan adalah anak-anak.

Dalam 5 tahun terakhir, Maladewa menjadi salah satu tempat diperdagangkannya perempuan dan anak-anak. Sedikitnya 60.000 pekerja asing yang berasal dari Bangladesh dan India (beberapa berasal dari Sri Lanka, Nepal dan Pakistan) tidak memiliki dokumen di Maladewa. Korban mengalami penipuan, pemaksaan dalam bekerja, penyitaan identitas dan dokumen perjalanan, upah yang kecil bahkan tidak dibayarkan, beberapa bahkan mengalami kekerasan dan eksploitasi seksual. Sedangkan perempuan yang berasal dari Maladewa sebagian diperdagangkan ke Sri Lanka.

Sementara itu, Badan Investigasi Federal (*Federal Investigation Agency*) Pakistan mengatakan sebanyak lebih dari 7.000 kasus perdagangan manusia dilaporkan pada tahun 2016 hingga 2017. Di tahun 2016 tercatat 4.096 kasus, dimana 3.349 kasus berada di wilayah Punjab, provinsi yang berbatasan langsung dengan India. Pada tahun 2017 terdapat 3.334 laporan atas perdagangan manusia, 2.784 diantaranya berada di Punjab dan sebanyak 324 kasus yang dilaporkan terjadi di Wilayah Ibu Kota Islamabad. Beberapa kelompok kejahatan transnasional terorganisir menyelundupkan manusia secara ilegal untuk diperdagangkan ke Eropa melalui jalur Pakistan-Iran-Turki-Yunani (Geo News, 2017).

Sedangkan Nepal mengalami kenaikan angka perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak, setelah terjadinya gempa di tahun 2015 (The Himalayan Times, 2016). Perdagangan manusia di Nepal

dilaporkan melalui rute Rupaiddiha-India untuk kemudian dikirim ke beberapa negara seperti Korea Selatan, China, Malaysia, beberapa negara Timur Tengah, Meksiko hingga Amerika Serikat. Tercatat 1.000 perempuan Nepal dieksploitasi dan diperdagangkan ke Korea Selatan dan China dengan penipuan janji pernikahan kewarganegaraan, kehidupan yang lebih baik dan kesempatan kerja oleh biro atau agen tenaga kerja tidak bertanggung jawab. Tahun 2014 PBB memperkirakan sekitar 7.000 perempuan dan anak perempuan Nepal diperdagangkan ke India setiap tahunnya. *Walk Free Foundation*, sebuah organisasi yang bertujuan menghentikan perdagangan manusia dan perbudakan kontemporer, mengatakan 10 persen pernikahan perempuan korban perdagangan manusia Nepal dilakukan secara paksa (Free Walk Foundation, 2016).

Bangladesh turut menyumbang angka kejahatan perdagangan manusia. Diketahui bahwa korban yang diperdagangkan dari Bangladesh lebih banyak dari pada korban yang diperdagangkan ke Bangladesh. Korban yang diperdagangkan biasanya melalui rute mulai dari Dhaka, Bangladesh menuju Mumbai, India, kemudian menuju Karaci, Pakistan dengan tujuan akhir Dubai. Diperkirakan korban perempuan dan anak dari Bangladesh yang diperdagangkan ke India sebanyak 10.000 hingga 15.000 orang setiap tahunnya. Ini berarti lebih dari 50 anak dan perempuan diperdagangkan setiap harinya, tidak hanya ke India namun ke berbagai negara lainnya baik di satu kawasan maupun dengan rute jarak jauh.

Di Sri Lanka, *Sri Lanka Foreign Employment Bureau* pada November 2016 menemukan lebih dari 100 perempuan diperdagangkan ke Maladewa sebagai pekerja seks komersial. Di bulan yang sama juga telah ditemukan korban 5 perempuan Sri Lanka diperdagangkan sebagai pekerja seks di Malaysia (Thomas, 2016). Mayoritas korban yang diperdagangkan dari Sri Lanka adalah perempuan dan anak perempuan dibawah umur 15 tahun

dengan tujuan eksploitasi seks, pernikahan paksa dan pernikahan anak.

Pada kasus perdagangan manusia yang terjadi di India, pusat perdagangan manusia domestik berada di Kolkata, West Bengal. India menjadi negara tujuan perdagangan atau sebagai tempat penampungan sementara sebelum akhirnya korban disalurkan ke negara-negara tujuan untuk rute perdagangan manusia menengah dan jarak jauh. Menurut *Global Slavery Index* terdapat 18 juta orang India yang terlibat dalam perbudakan dan sekitar 135.000 diantaranya adalah anak-anak yang diperdagangkan di India.

Sedangkan di Bhutan, pendataan yang dilakukan oleh *UN Women* mencatat 26% anak perempuan di Bhutan mengalami pernikahan dini di tahun 2016. Seperti negara di Asia Selatan lainnya, masalah ekonomi yang buruk menjadi faktor terjadinya imigrasi dengan penipuan janji kesempatan kerja yang layak. Kekerasan juga dirasakan sebagian besar perempuan Bhutan. Salah satu faktor penyebab kekerasan pada perempuan di Bhutan adalah konsumsi dan kecanduan alkohol yang berlebihan oleh pasangan.

Konflik yang berlangsung di Afghanistan membuat banyak orang memutuskan untuk mengungsi. Pengungsi menjadi kelompok yang sangat rentan untuk diperdagangkan, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan harapan hidup yang lebih baik, sangat mudah bagi pengungsi untuk menyetujui ajakan untuk bermigrasi ke luar negeri. Lebih dari 6 juta pengungsi yang berasal dari Afghanistan tinggal di lebih dari 70 negara di dunia, sebagian besar dari pengungsi dipaksa untuk bekerja dengan upah yang minim.

Negara-negara di Asia Selatan telah mengkriminalisasikan perdagangan manusia sesuai dengan Protokol Perdagangan Manusia PBB. Kampanye mengenai masalah tersebut serta pengenalan terhadap pelanggaran dan hukuman atas tindakan perdagangan

manusia telah diperkuat agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam mencegah dan mengurangi angka perdagangan manusia. Meskipun dengan tindakan dan sarana yang berbeda, beberapa negara termasuk Afghanistan dan Maladewa telah mekriminalkan segala bentuk eksploitasi yang disebutkan di dalam protokol.

Masing-masing negara di Asia Selatan juga telah memiliki undang-undang terkait batas minimum anak untuk bekerja. Pemenuhan hak-hak perempuan dalam memiliki kesempatan kerja yang sama juga tengah gencar dilakukan. Perempuan Asia Selatan sudah mulai mengerti pentingnya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan begitu pandangan akan pernikahan dan pekerjaan akan lebih baik.

Negara-negara di Asia Selatan memiliki permasalahan yang serupa dalam menghadapi masalah perdagangan manusia. Meski telah memiliki berbagai undang-undang larangan, hukuman bagi tindakan perdagangan manusia, serta perlindungan terhadap korban, namun pelaksanaannya dalam lingkungan masyarakat sering tidak berjalan dengan baik. Meski telah diperkenalkan kepada masyarakat mengenai permasalahan tersebut, masyarakat terutama di wilayah pedesaan masih berpikir tradisional.

Hal lain yang terjadi dengan korban adalah pembinaan dan perlindungan yang kurang bagi korban perdagangan manusia. Korban yang ditemukan, akan ditampung sementara oleh pemerintah setempat. Selanjutnya korban akan menunggu keputusan atau penetapan atas kasus tersebut sebelum akhirnya dipulangkan ke negara asalnya. Negara asal akan memberikan pembinaan terkait pemulihan psikis dan fisik mereka, kemudian diberikan keterampilan dasar tentang bekerja guna dapat kembali diterima dalam lingkungan keluarga. Namun program yang seharusnya dijalankan seperti itu kerap kali tidak berjalan, akibat beberapa masalah penyaluran dana dari pemerintah, kurangnya

penyediaan rumah rehabilitasi dan tenaga kerja yang ikut berpartisipasi langsung dalam membantu korban, serta proteksi yang tidak menjamin korban untuk mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Beberapa korban tidak diterima kembali ke dalam keluarga, karena ekonomi keluarga yang sudah cukup sulit. Maka tidak jarang dari korban yang sebelumnya sudah diselamatkan, kembali terjatuh dalam lingkaran perdagangan manusia.

## **B. Perdagangan Manusia yang Terjadi di India**

India adalah negara yang terkenal akan budayanya yang kaya dan sangat berciri khas. Negara yang terkenal akan *Bollywood*-nya ini memiliki jumlah total penduduk sebanyak 1,324 miliar jiwa di tahun 2016 dengan keseluruhan wilayah India seluas 3.287 juta km<sup>2</sup>. Hal tersebut menjadikan India sebagai negara dengan penduduk terbanyak kedua di dunia setelah China. Wilayah India sendiri berbatasan langsung dengan 7 negara-negara lainnya di Asia Selatan.

Mayoritas penduduk India (lebih dari 50 persen) bekerja pada sektor pertanian. Hasil pertanian menjadi komoditas ekspor terbesar keempat, yakni 10 persen dari jumlah total ekspor India. *Department of Industrial Policy and Promotion* mengatakan dengan berkembangnya industri pertanian dan pertanian menarik banyaknya investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI) yang masuk ke India. India telah menjadi negara dengan produsen makanan terbesar kedua di dunia. Selain itu, India telah menjadi negara dengan produsen makanan terbesar kedua di dunia. Namun, produktifitas kerja di sektor pertanian cenderung rendah. Sektor pertanian hanya menyumbang 16,1 persen untuk PDB India di tahun 2015. Sebanyak 54,4 persen lainnya dihasilkan oleh sektor pelayanan jasa dan 29.5 persen berasal dari sektor industri.

Pertumbuhan ekonomi India berkembang cepat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2015, pertumbuhan PDB India mencapai angka 8,1 persen.

Namun angka ini mengalami penurunan menjadi 7,1 persen di tahun 2016 dan 6,3 persen di tahun 2017 (World Bank, 2017). Pada tahun 2016-2017 FDI yang ada di India mencapai angka tertinggi, yaitu 43,4 miliar US\$. *World Bank* juga memperkirakan akan ada peningkatan investasi swasta di India hingga 8,9 persen di tahun 2018-2019, sehingga mendorong naiknya PDB India pada tahun tersebut (IBEF, 2018).

India memiliki peradaban kuno yang hingga saat ini masih melekat pada ciri khas negara tersebut. Sehingga nilai-nilai dan perilaku masyarakatnya, sifat dari budaya politiknya serta proses politiknya sangat terpengaruh oleh budaya-budaya tradisional dan pengalaman kontemporer (Baxter, Malik, Kennedy, & Oberest, 1986). Hal ini terpengaruh oleh kerajaan Hindu di India. Penduduk paling awal di India tinggal di lembah sungai Soan di Rawalpindi, Pakistan. Kemudian datang orang-orang Dravida yang memuja dewa-dewi. Kemudian kelompok ini dikalahkan oleh orang-orang Arya yang lebih kuat secara fisik dan senjata (Musidi, 2012, hal. 2-3).

Sebanyak lebih dari 70 persen dari total penduduk India saat ini beragama Hindu. Sedangkan 14,2 persen lainnya beragama Islam. Dengan mayoritas penduduk yang beragama Hindu dan tradisi budaya yang masih dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakatnya, maka sistem yang berlaku dalam berkehidupan pada masyarakat India lebih memberatkan kepada ajaran-ajaran Hindu.

Beberapa permasalahan di India dengan berbagai jalan telah menjerumuskan banyak orang pada akhir yang tragis, yaitu perdagangan manusia. Tingkat ekonomi rendah, keterbatasan lapangan kerja terutama untuk perempuan, pendidikan rendah, tidak berpengalaman kerja atau tidak memiliki keterampilan dasar, adalah alasan utama sebagian besar orang untuk bermigrasi, termakan janji penipuan untuk bekerja, atau melakukan pernikahan yang berakhir pada lingkaran perdagangan manusia.

India menjadi salah satu negara yang menjadi tempat transit, tempat tujuan ataupun berasalnya perdagangan manusia. Lebih dari 80% perdagangan manusia di India terjadi di dalam negeri. Perdagangan manusia di India tidak hanya terjadi antar wilayah di dalam negeri saja, melainkan telah menjadi “komoditas” luar negeri. Sebagian besar orang yang terjerumus kedalamnya diakibatkan penipuan kerja. Angka ini terus bertambah tiap tahunnya.

Tabel 2.1. Jumlah Kasus Perdagangan Manusia di India Tahun 2010-2015

Crime head wise incidence of various crimes under Human Trafficking in India During 2010-2015								
Sr. No.	Crime Head	Years						% increase (+)/decrease (-) in 5 year
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Procurement of minor girls (Sec. 366-A IPC)	679	862	809	1224	2020	3087	354.6
2	Importation of girls from foreign country (Sec. 366B IPC)	36	80	59	31	13	06	-83.3
3	Selling of minor for prostitution (Sec. 372 IPC)	130	113	108	100	82	111	-14.6
4	Buying of minor for prostitution (Sec. 373 IPC)	78	27	15	6	14	11	-85.9
5	Immoral Trafficking (Prevention) Act 1956	2499	2435	2563	2579	2617	2641	5.7
6	Human Trafficking (Sec. 370 & 370A IPC)	-	-	-	-	720	1021	
	Total Cases of Human Trafficking	3422	3517	3554	3940	5466	6877	100.9

Source: (Sanyal, 2017)

Di tahun 2013, *National Crime Records Bureau* atau Biro Catatan Kejahatan Nasional India mencatat sebanyak 3.940 kasus yang dilaporkan atas perdagangan manusia, meningkat 10,4 persen dari laporan di tahun 2012 (NCRB, 2013). NCRB melaporkan adanya peningkatan perdagangan manusia tiap tahunnya di India. Jumlah ini meningkat hingga 5.466 kasus di tahun 2014 dan menjadi 6.877 kasus di tahun 2015 (Sanyal, 2017).

Di tahun 2016 jumlah kasus yang terlapor sebanyak lebih dari 8.000 kasus dengan lebih dari 22.000 korban, ratusan diantaranya bukan warga negara India. Polisi India mengatakan dapat menemukan hingga 60 korban perdagangan manusia tiap harinya. Lebih dari 40 persen

korban masih berada dibawah umur. Dari tahun 2015 hingga 2016, lebih dari 60 persen korban adalah anak-anak.

Di akhir tahun 2016 NCRB India kembali memberikan laporan secara menyeluruh dan lebih spesifik mengenai seluruh kejahatan yang terjadi di India. Dari hasil laporan tersebut didapatkan data kejahatan terhadap wanita dengan tujuan perdagangan manusia terjadi sebanyak 694 kasus dengan jumlah total korban sebanyak 1.310 orang. Sementara kejahatan terhadap anak-anak dengan tujuan pernikahan paksa (sesuai dengan IPC seksi 366) terjadi kepada 17.672 korban dan sebanyak 155 korban ditujukan untuk prostitusi (NCRB, Ministry of Home Affairs, 2016, hal. 189-213).

Dalam laporan berisi tabel tersebut, dikatakan kejahatan yang berhubungan dengan perdagangan manusia terbanyak berawal dari penculikan, dengan korban terbanyak adalah anak-anak, terutama anak perempuan. Total penculikan anak yang terjadi di seluruh India pada tahun 2016 adalah sebanyak 67.409 korban usia 0-18 tahun, lebih dari 50.000 korban adalah anak perempuan. Rentang usia korban terbanyak adalah anak-anak dengan umur 12-18 tahun. Sekitar 18.000 anak perempuan dipaksa untuk menikah, sedangkan 86 korban anak perempuan lainnya diperdagangkan dengan tujuan prostitusi. Sementara lebih dari 100 korban anak laki-laki dan perempuan diculik dengan tujuan dijual, menjadi pengemis dan budak (NCRB, Ministry of Home Affairs, 2016, hal. 110-126).

Kasus yang sama juga terjadi pada orang dewasa rentang umur 18 hingga 60 tahun. Perempuan menjadi korban terbanyak dengan jumlah 26.683 di wilayah negara bagian India. Sementara itu, di 19 kota besar di India dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta jiwa, ditemukan 2.549 korban penculikan terhadap orang dewasa, 1.597 diantaranya adalah perempuan (NCRB, Ministry of Home

Affairs, 2016, hal. 122-126). Laporan lengkap mengenai data korban terlampir di bagian belakang karya tulis ini.

Kebanyakan kasus perdagangan manusia terjadi di West Bengal. West Bengal yang berbatasan langsung dengan Bangladesh menjadi tempat transit perdagangan manusia dari luar negeri, untuk selanjutnya didistribusikan ke kota-kota lain di India dan ke negara lain. Kota Rajasthan menjadi kota kedua dengan perdagangan manusia terbanyak di India. Seperti halnya West Bengal, Rajasthan berbatasan langsung dengan negara tetangga India, yaitu Pakistan. Kedua daerah ini memiliki arus migrasi luar dan dalam negeri cukup tinggi sehingga rentan terhadap perdagangan manusia.

India telah mengkriminalkan berbagai kejahatan yang berhubungan dengan perdagangan manusia. Masalah yang India hadapi tidaknya bagaimana India dapat mencegah, menekan perdagangan manusia terjadi dan menghukum para pelaku, tapi juga memulihkan kembali korban setelah kejahatan tersebut terjadi. Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, memberikan edukasi dan penyembuhan kembali serta perlindungan terhadap korban, serta mengatasi masalah ekonomi agar penduduknya tidak terjerumus pada pilihan-pilihan yang salah adalah hal yang harus dilakukan India.

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebenarnya telah diperkenalkan kepada masyarakat agar seluruh komponen masyarakat dapat berpartisipasi dalam memerangi tindakan perdagangan manusia. Media di India turut berperan dalam memberikan informasi maupun edukasi mengenai perdagangan manusia.

### **C. Perdagangan Manusia yang Terjadi di Bangladesh**

Bangladesh merupakan negara kedelapan di dunia dengan populasi terbanyak, yaitu sekitar 163 juta jiwa (World Bank, 2016). Bangladesh memiliki luas sekitar 147,57 km<sup>2</sup>. Wilayah Bangladesh sendiri merupakan dataran rendah yang berbatasan langsung dengan India

sepanjang lebih dari 4.000 km dan Burma dengan arus migrasi Bangladesh-India dan Bangladesh-Burma yang besar.

Mayoritas penduduk Bangladesh beragama Islam dengan jumlah lebih dari 80 persen. Penduduk Bangladesh merupakan orang-orang Benggali yang beragama Islam. Sedangkan mayoritas orang Benggali yang beragama Hindu tinggal di West Bengal, India. Negara ini dulunya merupakan bagian dari negara Pakistan dengan nama Pakistan Timur, atau ada yang menyebutnya dengan wilayah East Bengal, kemudian merdeka di tahun 1971. Arti kata Bangladesh sendiri adalah negeri orang-orang Benggali.

Perekonomian Bangladesh tidak menunjukkan perubahan besar, namun tetap berkembang. Inflasi keseluruhan Bangladesh turun di 5,65 persen di tahun 2016 (World Bank, 2016). Nilai tukar resmi GDP Bangladesh di tahun 2017 mencapai 250 miliar dolar dengan nilai pertumbuhan GDP sebesar 7,2 persen di tahun 2016 dan turun menjadi 7,1 persen di tahun 2017. Lebih dari 50 persen penyumbang GDP Bangladesh berasal dari sektor pelayanan jasa, sedangkan sektor pertanian hanya menyumbang sekitar 14 persen (CIA, 2018). Sebesar 70 persen lahan di Bangladesh digunakan sebagai lahan pertanian.

Berbagai permasalahan muncul di negara yang masih berkembang ini. Salah satu masalah yang menjadi *concern* Bangladesh saat ini adalah perdagangan manusia. Tidak ada satu pun negara dapat menghindari adanya perdagangan manusia, termasuk Bangladesh. Perdagangan manusia di Bangladesh umumnya ditujukan untuk menjadi pekerja seks komersial dan kerja paksa. Sebagian besar korban adalah perempuan dengan rentang usia 11-18 tahun dan anak laki-laki dibawah 10 tahun. Anak laki-laki yang diperdagangkan ke wilayah Timur Tengah biasanya dipekerjakan sebagai joki balap unta dan buruh konstruksi

bangunan, dengan upah rendah dan jam kerja berlebih. Tidak jarang yang berakhir dengan kematian.

Pedagangan manusia Bangladesh terus meningkat tiap tahunnya. Angka korban perdagangan manusia dari Bangladesh menuju India mencapai 50.000 di tahun 2016. Pada tahun 2014, pemerintah Bangladesh menyelidiki 146 kasus perdagangan manusia untuk seks dan 12 kasus untuk kerja paksa. Jumlah ini meningkat di tahun 2015, dimana pemerintah Bangladesh menemukan kasus perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seks komersial sebanyak 181 kasus dan 265 kasus untuk perdagangan manusia dengan tujuan kerja paksa (UNHCR, 2018). Tahun selanjutnya angka ini mengalami penurunan menjadi 122 kasus perdagangan manusia untuk eksploitasi seks dan untuk kerja paksa sebanyak 168 kasus (U.S. Embassy Dhaka, 2017).

Terdapat 20 titik transit perdagangan manusia di sepanjang perbatasan India-Bangladesh. Daerah perbatasan Khulna, Jessore, Satkhira, Rajshahi, Dinajpur, Rangpur, Mymensingh, Comilla, Brahmanbaria, dan Sylhet sering digunakan sebagai rute darat untuk perdagangan. Di wilayah utara, perdagangan manusia terjadi di distrik Kurigram, Lalmonirhat, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon, Dinajpur, Naogaon, Chapai Nawabganj dan Rajshahi di selatan (Amin, 2011). Wilayah Bangladesh Utara menjadi tempat yang paling rentan terjadinya perdagangan manusia. Perdagangan manusia dari Bangladesh ke Timur Tengah biasanya melalui jalur Dhaka-Mumbai-Karachi-Dubai.

Perdagangan manusia di Bangladesh tidak hanya dipasok dari penduduk Bangladesh saja, melainkan juga dari pengungsi Rohingya. Di tahun 2017, tercatat lebih dari 68.000 pengungsi Rohingya telah menyeberang ke Bangladesh dan UNHCR mendeteksi lebih dari 800.000 pengungsi berada di Bangladesh hingga saat ini. Pada tenda-tenda pengungsi di perbatasan wilayah Bangladesh Selatan-Burma, anak-anak hidup terpisah dari orang

tuanya. Perempuan muda dan anak-anak menjadi objek rentan untuk diperdagangkan. Umumnya pelaku perdagangan menjanjikan pekerjaan atau pernikahan kepada gadis-gadis muda usia 13-18 tahun. Pengungsi memiliki keadaan dimana mereka tidak mempunyai pekerjaan, tempat tinggal dan uang. Tawaran itu berupa kehidupan yang lebih baik dan pekerjaan, dengan menjanjikan kepada para orang tua bahwa hidup anak-anak mereka akan lebih baik di kota-kota di India. Setelah menerima tawaran pelaku, korban akan diseludupkan ke India untuk menjadi pekerja seks, melakukan pernikahan paksa dan kerja paksa. Sebagian besar identitas mereka ditahan dan diganti dengan identitas India palsu agar mereka tidak dapat melarikan diri.

Tingkat migrasi penduduk Bangladesh ke luar negeri pada tahun 2016 mencapai lebih dari 750.000 orang (BMET, 2018). Hampir serupa dengan para pengungsi, penduduk Bangladesh yang berasal dari pedesaan dengan keadaan sosio-ekonomi rendah juga kerap kali menjadi sasaran perdagangan manusia, bahkan oleh kerabat, tetangga atau saudara sendiri. Kebanyakan korban tertipu dengan pekerjaan dengan upah yang tinggi. Laporan lengkap mengenai data migrasi Bangladesh terlampir di bagian belakang karya tulis ini.

Hanya 40 persen dari imigran perempuan Bangladesh yang berimigrasi melalui agen perekrutan resmi. Sedangkan 60 persen lainnya melalui pelaku dan agen-agen perdagangan manusia (Rabby, 2015). Sebagian besar imigran perempuan keterampilan rendah dan bekerja pada sektor rendah dengan eksploitasi kerja di negara-negara Teluk, seperti Uni Emirat Arab, Qatar dan Kuwait. Imigran dipaksa bekerja, dengan upah kecil dan waktu kerja yang berlebih tanpa hari libur, gaji yang ditahan atau bahkan tidak dibayarkan, sebagian mengalami pelecehan seksual dan pernikahan paksa. Meskipun begitu, upah rendah bekerja di luar negeri tetaplah jauh lebih baik dari pada di dalam negeri. Sementara itu, adanya biaya

perekrutan migrasi yang tidak sedikit dan harus dibayar dimuka membuat sebagian korban terjerat hutang untuk mengurus migrasi mereka ke luar negeri. Tidak jarang korban kembali ke dalam lingkaran perdagangan akibat masih terlilit hutang.

Hal lain yang menjadi kekhawatiran adalah kenyataan bahwa Bangladesh menjadi negara dengan tingkat pernikahan anak di bawah usia 15 tahun tertinggi di Asia. Di tahun 2016, sebanyak 52 persen perempuan Bangladesh menikah dibawah usia 18 tahun dan 18 persen lainnya menikah dibawah usia 15 tahun (Barr, 2016). Beberapa pejabat setempat menerima suap untuk memalsukan akte kelahiran perempuan muda. Pada November 2017, pemerintah Bangladesh menyetujui rancangan undang-undang pernikahan anak usia dibawah 18 tahun dengan “keadaan khusus” seperti hamil diluar nikah misalnya. Tidak ada batasan usia minimal dalam undang-undang tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran penyalahgunaan terhadap pernikahan dan tidak terpenuhinya hak-hak anak Bangladesh. Padahal di tahun 2014, Perdana Menteri Hasina menjanjikan untuk mengakhiri pernikahan anak dibawah usia 15 tahun di tahun 2021 mendatang (Barr, 2016).

Kemiskinan membuat penduduk yang terjerumus dalam perdagangan manusia memilih untuk bertahan, demi membantu perekonomian keluarga di tempat mereka berasal. Beberapa orang tua yang melacak keberadaan anaknya, membayar tebusan yang tinggi untuk mendapatkan anaknya mereka kembali dengan menjual harta benda mereka, berakhir dengan kemiskinan yang lebih buruk. Tidak jarang korban memilih untuk kembali ke dalam perdagangan manusia karena terlilit hutang.

Beberapa hukum dan peraturan Bangladesh terkait perdagangan manusia telah berjalan. Akan tetapi pelaksanaannya sulit di masyarakat. Beberapa orang tua korban perdagangan manusia dengan tujuan seks komersial terkadang menutup-nutupi penyelidikan

terhadap korban karena kejahatan yang terjadi dianggap sebagai aib keluarga. Beberapa korban bahkan tidak diterima kembali dalam keluarga dengan alasan akan lebih menyulitkan perekonomian keluarga, memberikan aib bagi keluarga atau anggapan hidup di luar jauh lebih baik dai pada di desa.

